

PERKEMBANGAN PEMUKIMAN EROPA DI SURABAYA TAHUN 1906-1940

Anjani Hayatunnufus¹

Abstrak

Pemukiman Eropa di Surabaya pada awalnya berada di sekitar benteng yang berada di pesisir dan di kawasan Jembatan Merah. Perkembangan yang signifikan terjadi ketika Surabaya diberi hak otonomi untuk mengelola anggaran dananya secara mandiri yang ditandai dengan pemberian status gemeente pada 1906. Setelah menjadi Gemeente Surabaya, perluasan daerah pemukiman Eropa dilakukan ke arah selatan kota seperti Goebeng, Ketabang, Koepang, Ngagel, Darmo yang dilakukan secara bertahap. Memasuki tahun 1930 pembangunan perumahan semakin gencar dilakukan, fasilitas umum juga banyak yang mengalami renovasi. Hingga menjelang akhir pemerintahan kolonial, keadaan pemukiman Eropa di Surabaya berubah. Rumah-rumah mereka dijarah, sekolah-sekolah diubah menjadi barak pertahanan, pertokoan dirampok, dan Jepang terus melakukan pengeboman untuk meyakinkan orang Eropa bahwa masanya telah berakhir. Keberadaan pemukiman Eropa di Surabaya juga membawa pengaruh bagi penduduk Bumiputera, seperti pada awalnya mereka terasingkan ke pinggiran kota menempati kampung yang kumuh. Menyikapi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk memperbaiki kampung-kampung yang dihuni penduduk Bumiputera agar menjadi lebih nyaman dan bersih.

Kata kunci: *Pemukiman, Etnis Eropa, Kota Surabaya*

Abstract

European settlements in Surabaya were initially located around the fort on the coast and in the Red Bridge area. Significant development occurred when Surabaya was given autonomy rights to manage its budget independently which was marked by the granting of gemeente status in 1906. After becoming Gemeente Surabaya, the expansion of European residential areas was carried out towards the south of the city such as Goebeng, Ketabang, Koepang, Ngagel, Darmo which was carried out in stages. Entering the 1930s, housing construction was intensified, and many public facilities were also renovated. Until the end of colonial rule, the situation of European settlements in Surabaya changed. Their houses were looted, schools were converted into defense barracks, shops were robbed, and the Japanese continued to bomb to convince Europeans that their time was over. The existence of European settlements in Surabaya also had an impact on the Bumiputera population, as they were initially relegated to the outskirts of the city to occupy shabby villages. In response, the government made a policy to improve the villages inhabited by the Bumiputera population to make them more comfortable and clean.

Keywords: *Settlement, Ethnic Europe, Surabaya City.*

A. Pendahuluan

Kota Surabaya merupakan salah satu kota tujuan bangsa-bangsa Eropa dalam misinya menjelajah Negeri Timur. Secara geografis kota ini dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Selat Madura di sebelah timur, di mana lokasi tersebut dijadikan sebagai pusat kedudukan VOC di Jawa bagian Timur. Orang-orang Eropa pertama kali datang ke daerah Jawa Timur diperkirakan sekitar abad ke-16, diketahui yaitu orang-

orang Portugis, Inggris, baru kemudian Belanda. Awalnya mereka mendarat di pelabuhan Gresik, bukan di pelabuhan Surabaya dikarenakan pada saat itu pelabuhan Gresik lebih strategis dibandingkan pelabuhan Surabaya. Beberapa tahun setelahnya, barulah orang-orang Eropa ini mendarat di pelabuhan Surabaya.²

Pada awalnya, pelabuhan Surabaya terletak di Sungai Kalimas sebagai muaranya sehingga disebut Pelabuhan Kalimas. Sungai

¹ Alumni Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret.

² [G.H. von Faber, *Oud Soerabaia*, \(Soerabaia: Gementee Soerabaia, 1931\), hlm. 6](#)

Kalimas merupakan cabang dari Sungai Brantas yang aliran sungainya masuk ke Surabaya. Lokasi tersebut menjadi strategis karena dukungan daerah *hinterland* yang subur sebagai penghasil komoditi ekspor contohnya beras, kopra, kopi, gula, tembakau, indigo, dan lain sebagainya, Surabaya kemudian berperan sebagai kota pelabuhan terbesar di Jawa setelah *Batavia*.³

Ramainya kegiatan perdagangan komoditi ekspor (beras, kopra, kopi, gula, tembakau, indigo) menjadikan kawasan pelabuhan bukan hanya sebagai pusat perekonomian, tetapi sebagian wilayahnya juga digunakan sebagai tempat bermukim bagi orang-orang yang datang ke Surabaya.⁴ Pemukiman awal orang-orang Eropa ini berada di dalam benteng-benteng yang dibangunnya sebagai pertahanan, tempat menyimpan barang dagang, senjata, dan lain sebagainya. Di dalam benteng tersebut juga dilengkapi fasilitas untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari, seperti gudang-gudang, kantor, gereja, rumah sakit, dan lain-lain.

Pada saat orang-orang Eropa mulai bermukim di luar Benteng, mereka menempati sebuah kawasan di sekitarnya yaitu Jembatan Merah. Kawasan Jembatan Merah menjadi pusat kota yang didominasi oleh penduduk Eropa, Tionghoa, Arab, Melayu, dan Timur Asing dengan pemisahan daerah pemukiman berdasarkan etnis. Orang Eropa bermukim di sebelah barat Jembatan Merah dan orang-orang Tionghoa, Arab, Melayu, dan Timur Asing bermukim di sebelah timur Jembatan Merah. Bagi penduduk Bumiputera mereka menempati

kampung-kampung yang berada di luar tembok kota Surabaya.⁵

Kota-kota di Hindia Belanda, termasuk Surabaya mengalami perubahan ketika diberlakukannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870. Adanya pemberlakuan undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi para pemilik modal swasta asing untuk menjalankan investasinya di Hindia Belanda dengan terutama dalam bidang perkebunan dengan cara menyewa tanah penduduk pribumi. Hal ini mendorong bertumbuhnya tenaga kerja di sektor tersebut, sehingga memicu munculnya mobilitas sosial penduduk.⁶ Bersamaan dengan hal ini, tahun 1871 pemerintah melakukan penghancuran benteng-benteng serta tembok-tembok yang mengelilingi kota dengan tujuan untuk memperluas wilayah pemukiman.

Perkembangan Kota Surabaya semakin terlihat signifikan ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisati Wet*) pada 23 Juli 1903. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu yang dianggap mampu mengelola anggaran untuk kepentingan daerahnya sendiri.⁷ Salah satu daerah yang mendapat status otonom adalah Surabaya dengan penetapan sebagai *gemeente* atau kota praja pada 1 April 1906 berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 149 tahun 1906.

Sejak terbentuknya *Gemeente* Surabaya, perluasan wilayah pemukiman semakin gencar dilakukan ke arah selatan kota di antaranya seperti Goebeng, Ketabang,

³ Trisulistiyono, dkk., *Simpul-simpul Sejarah Maritim dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia*, (Jakarta: Kemenbudpar, 2003), hlm. 111.

⁴ Lillyana Mulya, "Kebijakan Maritim di Indonesia Masa Kolonial dan Pasca Kolonial", *Tesis, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*, hlm. 88.

⁵ Sri Retna Astuti, Dwi Ratna Nurhajarini, dan Nurdiantanto, *Pembangunan Pelabuhan Surabaya dan*

Kehidupan Sosial Ekonomi di Sekitarnya Pada Abad XX, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, 2016), hlm. 25-26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), hlm. 16-17.

Koepang, Ngagel, Darmo. Memasuki tahun 1930, perkembangan pemukiman Eropa di Surabaya semakin berkembang pesat salah satunya ditandai dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan perumahan umum atau *N.V. Volkshuisvesting*. Rumah-rumah yang dibangun tidak hanya untuk orang Eropa, beberapa juga diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera. Fasilitas umum juga banyak yang mengalami perbaikan dan ada juga yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸

Sampai menjelang akhir masa pemerintahan kolonial, pada 1937 Surabaya sudah melakukan persiapan membentuk korps sipil pertahanan udara. Ketidakstabilan mulai tampak pada tahun 1940 khususnya di kalangan masyarakat Eropa, ketika rumah-rumah mereka dijarah, sekolah-sekolah mereka diubah menjadi barak pertahanan, pertokoan dirampok, dan lain sebagainya.⁹

B. Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap pemilihan topik, pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).¹⁰ Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap pemilihan topik. Topik yang diambil dalam penelitian ini secara garis besar mengarah pada tema sejarah perkotaan khususnya pemukiman etnis Eropa. Setelah melalui tahapan pemilihan topik, selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data-data yang diperoleh mencakup data primer yang berupa arsip dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Pengumpulan data merupakan pemilihan suatu subjek dan informasi mengenai subjek. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan serta mengumpulkan

jejak dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Sumber pengumpulan data ini dilakukan di beberapa tempat seperti: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Digital library milik Delpher dan Universitas Leiden, surat kabar *Het Nieuws Van Den Dag* dan *De Indische Courant*.

Tahapan selanjutnya adalah tahap kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan eksternal. [Kritik internal dilakukan untuk melihat kelayakan dari sumber-sumber yang telah didapatkan untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk penelitian dan penulisan skripsi. sedangkan eksternal untuk melihat sumber-sumber yang ditemukannya apakah sumber yang didapat tersebut merupakan sumber sezaman atau sumber primer atau sumber sekunder dilihat dari tahun pembuatnya. Tahap berikutnya yaitu interpretasi atau penafsiran. Interpretasi ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber tertulis atau lisan untuk memperoleh fakta yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Tahap terakhir pada metode sejarah adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah yang merupakan rangkaian dari fakta-fakta yang telah dianalisis dan diinterpretasi dari sumber-sumber yang dimiliki.](#)

C. Keadaan Pemukiman Eropa di Surabaya Sebelum Menjadi Gemeente

Kota-kota berciri khas Asia telah banyak berkembang dengan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan juga Islam. Pengaruh ini diekspresikan dalam struktur pemukiman sesuai dengan urutan periode masing-masing yang berbeda. Kedatangan orang Eropa ke Hindia Belanda kemudian membawa perubahan baru pada struktur

(*Surabaya 1926-1946*), (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 104-113.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 1995), hlm. 69-80.

⁸ *Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Arsip tentang laporan kota praja Surabaya bagian perumahan umum, hlm. 291.

⁹ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia*

pemukiman yang telah berkembang sebelumnya. Pemukiman Eropa ini mulanya hanya memiliki pengaruh kecil terhadap pemukiman penduduk lokal karena mereka berkembang sebagai pusat-pusat eksklusif yang mandiri dan hanya di wilayah pesisir.¹¹

Pemukiman Eropa di Jawa terus berkembang karena adanya pembangunan serta perluasan jaringan perdagangan, di mana pabrik-pabrik didirikan, benteng-benteng juga didirikan untuk pertahanan. Jaringan perdagangan ini awalnya dilakukan di sepanjang pantai utara Jawa yang berbatasan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemukiman Jawa yang ada di sana. Di dalam benteng-benteng tersebut orang Eropa tinggal dengan dilengkapi berbagai fasilitas di dalamnya seperti kantor, gudang barang, gudang senjata, gereja, serta fasilitas hidup sehari-hari lainnya. Barulah pada akhir abad ke-17 mereka memberanikan diri untuk menetap di luar benteng.¹²

Orang-orang Eropa ini kemudian menempati kawasan di sebelah barat Jembatan Merah yang terdiri dari jalan-jalan utama seperti *Hereenstraat*, *Willemstraat*, *Roomskhatolikstraat*, *Boomstraat*, *Schoolstraat*, *Werfstraat*, dan *Societeitstraat* merupakan pemukiman orang-orang Eropa, sedangkan bagi orang-orang etnis Tionghoa, Arab, Melayu, Timur Asing menempati kawasan di sebelah timur Jembatan Merah dengan jalan utamanya yaitu *Handelstraat*, Kembang Djepun.

Kemajuan Kota Surabaya semakin terlihat secara signifikan pada tahun 1870 semenjak diberlakukannya kebijakan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*). Hal ini mengakibatkan terdapat banyaknya perusahaan swasta asing untuk menyewa tanah yang digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan perkebunan. Kebutuhan akan tanah tidak hanya digunakan sebagai

tempat usaha, namun juga digunakan untuk membangun sebuah hunian. Pemukiman bagi warga Eropa memiliki lahan yang sangat terbatas, bahkan rumah-rumah mereka tidak memiliki halaman. Hal ini dikarenakan Kota Surabaya saat itu masih dikelilingi oleh tembok-tembok yang membatasi kota.

Pada tahun ini pula pemukiman yang dibatasi oleh tembok-tembok kota itu tidak mampu lagi menampung perkembangan penduduknya, sehingga mulai dilakukan rencana perluasan pemukiman. Perubahan selanjutnya dalam tata ruang Kota Surabaya yaitu terjadi pada tahun 1871 ketika dilakukan penghancuran tembok-tembok yang mengelilingi kota. Penghancuran ini dilakukan dengan tujuan untuk perluasan pemukiman kota. Kebutuhan kota pada saat itu tidak hanya untuk pemukiman, akan tetapi juga permintaan kantor dan ruang gudang untuk perdagangan yang saat itu juga berkembang pesat.¹³

Perluasan kota terus berlanjut sampai pada tahun 1873, alun-alun besar diratakan terutama yang terletak di dekat *Passer Besar* (sekarang *Pasar Besar*). Tanah tersebut kemudian dijual per kavling untuk membangun rumah-rumah baru. Di sekitar *Passer Besar* tersebut, juga terdapat beberapa sarana prasarana kota di antaranya seperti toko penjahit Benselin Leclerc yang kemudian menjadi Hoffman, sebuah restaurant Grimm & Co, toko buku Van Ingen dan Hs. Vg. Onderling Belang, kemudian juga terdapat gedung kantor *Raad van Justitie* atau dewan kehakiman. Kawasan ini termasuk menjadi daerah perkantoran dan perdagangan. Jaringan jalan yang menghubungkan kawasan perkantoran dan perdagangan dengan pemukiman di sekitarnya antara lain *Simpangstraat*,

¹¹ Ronald Gilbert Gill, *De Indische stad op Java en Madura*, (Den Haag: Technische Universiteit Delft Faculteit der Bouwkunde, 1994), hlm. 39.

¹² *Ibid.*, hlm. 60.

¹³ *Ibid.*, hlm. 74

Kaliasin, Toendjoengan, Gemblongan, *Passer Besar*, dan Baliwerti.¹⁴

D. Keadaan Pemukiman Eropa di Surabaya Saat Awal Ditetapkan Menjadi *Gemeente* (1906)

Terbentuknya sebuah daerah menjadi *Gemeente*, tak terlepas dari adanya gagasan mengenai desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda. Desentralisasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan melimpahkan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Keluarnya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903 menjadi dasar awal dibentuknya pemerintah kota secara otonom di berbagai daerah di Hindia Belanda. Undang-undang ini berisi perubahan pada pasal 68 *Regeringsreglement* 1854 dengan penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c. Ketiga pasal tambahan tersebut secara garis besar berisi mengenai pemisahan anggaran dana umum dan lokal serta pengalihan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan dan urusan pemerintahan tidak lagi terpusat hanya di tangan Gubernur Jendral.¹⁵

Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Decentralisatie Besluit* dan *Locale-raden Ordonnantie*. Setelah dikeluarkannya *Decentralisatie Besluit* dan *Local Radenordonnantie*, di tahun 1905 tersebut mulai diberikan hak otonomi mengenai pengaturan keuangan kepada karesidenan dan beberapa kota besar di Hindia Belanda. Daerah yang telah diberi hak otonomi kemudian berstatus menjadi

Gemeente, dengan adanya pemberian status tersebut, lembaga kemudian memperoleh hak atas wewenang yang dimiliki salah satunya yaitu untuk mengumpulkan pajak dari warga kota. *Gemeente* juga berhak untuk mengumpulkan dana dari penyewaan dan penjualan rumah, tanah, maupun dana hasil dari usaha-usaha yang dialihkan oleh pemerintah pusat.¹⁶ Setahun berikutnya, tepat pada tanggal 1 April 1906 Kota Surabaya telah resmi ditetapkan menjadi *Gemeente*.¹⁷

Perkembangan kota dengan adanya pemerintahan *Gemeente* menunjukkan bahwa kota Surabaya telah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yaitu 150.188, yang di antaranya adalah penduduk Eropa sejumlah 8.063. Populasi penduduk kota yang semakin meningkat ini kemudian menyebabkan kepadatan pada pemukiman penduduk. Pada tahun 1906 ini pusat pemukiman Eropa masih berada di kawasan Jembatan Merah, akan tetapi, daerah tersebut semakin lama semakin penuh sesak dikarenakan bercampurnya aktivitas perdagangan, industri, dan pemerintahan. Akhirnya pemukiman Eropa diperluas ke arah selatan dan masih berada di sepanjang bantaran Sungai Kalimas.¹⁸

E. Perluasan Pemukiman Eropa di Surabaya

Persoalan pemukiman di Surabaya bagi warga Eropa dan Timur Asing, secara administratif diatur ke dalam distrik-distrik atau lingkungan, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wijk*. Adanya *wijk* bertujuan

¹⁴ G.H. von Faber, *Oud Soerabaia*, (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hlm. 45-56.

¹⁵ *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 329 tahun 1903*, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Arsip tentang Undang-undang Desentralisasi 23 Juli 1903 di Hindia Belanda.

¹⁶ Teti Hestiliani, "Desentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903", *ISTORIA* Vol. 15, No. 2 September 2019.

¹⁷ *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 149 tahun 1906*, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Arsip tentang desentralisasi pemisahan dana untuk ibu kota Surabaya dari sumber daya keuangan umum Hindia Belanda dan pembentukan dewan kota.

¹⁸ G.H. von Faber, *Nieuw Soerabaia*, (Soerabaia: N.V. Boekhandel En Drukkerij H. Van Ingen, 1937), hlm. 2.

untuk mengontrol serta mengelola warga Eropa dan Timur Asing. Sejak berdirinya *Gemeente* Surabaya, nama-nama *wijk* ini ditandai dengan huruf abjad dengan total terdapat 25 *wijk*. Salah satu distrik atau *wijk* T merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan perumahan. *Wijk* T ini dibatasi oleh *Simpangstraat*, Kajoon, Kaliasin, dan Lemah Poetra. Di daerah *Simpang* atau *Simpangstraat*, banyak terdapat rumah para pejabat tinggi dan para pedagang, lalu di seberang Kroesenpark yang juga masih di daerah *Simpang* terdapat kediaman para residen.

Pada tahun 1908, pemerintah *Gemeente* Surabaya membeli tanah di daerah Goebeng seharga f 145.000. Tanah di Goebeng kemudian akan dibangun sebagai daerah pemukiman baru yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas dan sebagian besar untuk orang-orang Eropa.¹⁹ Setelah membeli tanah di Goebeng, tahun 1909 pemerintah kota kemudian membeli tanah lagi di Goebengdjepit yang juga difungsikan untuk pembangunan perumahan. Pemerintah kota juga memperhatikan kondisi jalanan di sekitarnya yang pada saat itu belum diaspal dan berdebu. Menyadari hal tersebut pemerintah mulai memperbaiki kondisi jalanan dengan melakukan pengaspalan.²⁰

Perhatian pemerintah kembali pada permasalahan ketersediaan ruang terbuka untuk perumahan atau pemukiman. Kemudian pemerintah kota mulai merencanakan pengembangan kawasan baru untuk daerah Koepang, Ketabang, Darmo dan Ngagel²¹ secara bertahap. Pembangunan

perumahan atau pemukiman di Koepang ditujukan bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga rumah-rumah yang nantinya dijual atau disewakan di kawasan ini harganya akan lebih terjangkau.²²

Masih di awal masa jabatan wali kota yang pertama, pada tahun 1916 pemerintah kota membeli tanah baru untuk pengembangan kota di daerah Ketabang seluas 100.4 ha. Pengembangan baru di Ketabang akan direncanakan sebagai daerah perumahan Eropa, sekolah Eropa, perkantoran kota praja, serta pelayanan publik lainnya. Perencana kawasan Ketabang masih dipercayakan kepada arsitek Cosman Citroen, akan tetapi, berbeda dengan kawasan Koepang yang sebelumnya dibangun perumahan murah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan Ketabang akan menyediakan perumahan bagi masyarakat kelas atas dan kelas menengah.²³

Bagi daerah Darmo, dikembangkan juga untuk pemukiman Eropa dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti Rumah Sakit Darmo, Rumah Sakit St, Vincentius A Paulo, Apotek Rathkamp & Co, Gereja Protestan Darmokapel, Gereja Komunitas Inggris di Surabaya, Gereja Pentakosta, dan lain-lain. Perkembangan pembangunan pemukiman Eropa terus berlanjut dari tahun ke tahun, sampai pada tahun 1927 pemerintah mendirikan sebuah perusahaan perumahan umum atau *N.V. Volkshuisvesting*. *N.V. Volkshuisvesting* kemudian membangun rumah-rumah baru dengan harga sewa terjangkau untuk penduduk Eropa dan juga

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁰ *Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913*, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Arsip tentang laporan kota praja Surabaya bagian tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota, hlm. 3.

²¹ Sejak awal Kota Surabaya menjadi *gemeente*, hampir setiap tahun lokasi pabrik-pabrik di kota bagian bawah diperluas. Pada tahun 1916 lokasi Ngagel dibeli dengan luas sekitar 5.500.000 m² dan dioperasikan sebagai kawasan industri. Kawasan ini

dijadikan sebagai kawasan industri karena lokasi Ngagel sebagian besar terletak dekat dengan rel kereta api dan sungai yang merupakan lokasi ideal dan terdapat peluang di sana untuk pengangkutan dengan kereta api maupun air. G.H. von Faber, *op.cit.*, hlm 172.

²² Joko Triwinarto Santoso, *A Study of Architect Cosman Citroen (1881-1935) And His Works in Surabaya*, (Leiden: Universiteit Leiden, 2010), hlm. 73.

²³ A.C. Broeshart, *Soerabaja: Beeld van een Stad*, (Purmerend: Asia Maior, 1994), hlm. 22.

Bumiputera. Hal ini dikarenakan kampung-kampung yang semakin padat penduduknya dan kondisi perumahan yang tidak layak huni. Selain itu, kelompok yang kurang kaya dari populasi Eropa di Surabaya sering memiliki perumahan yang buruk atau terlalu mahal.²⁴

Memasuki tahun 1930 penduduk Eropa di Surabaya mengalami angka lonjakan yang cukup tinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu sejumlah 26.463. Penduduk Surabaya selain etnis Eropa juga mengalami peningkatan, di antaranya terdapat 265.872 penduduk Bumiputera, 38.797 penduduk Tionghoa, dan 5.682 penduduk Arab dan Timur Asing.²⁵ Melihat data populasi penduduk yang cukup pesat tersebut, dewan kota memutuskan bahwa *N.V. Volkshuisvesting* akan terus melanjutkan pembangunan perumahan murah secara eksklusif di beberapa lokasi seperti Ketabang Timur II (daerah pinggiran), Simolawang, Oendaan II, *Viaductstraat*, dan Klein Kebalen.

F. Keadaan Pemukiman Eropa di Surabaya Menjelang Akhir Pemerintahan Kolonial

Pada tahun 1937, Surabaya merupakan salah satu kota pertama di Hindia Belanda yang membentuk korps sipil pertahanan udara. Hal ini dilakukan secara dini untuk memperhitungkan secara serius kedatangan perang serta melembagakan peringatan udara. Selain itu, pemerintah kolonial juga telah berpegang teguh pada peraturan yang ada dengan keyakinan penekanan ketenangan dan keteraturan (*rust en orde*). Muncul juga usulan tentang pendirian kantor penerangan perang yang berbahasa Indonesia dan penempatan radio umum di setiap kampung. Namun usulan tersebut

hanya sebatas pembicaraan saja. Lalu pada tahun 1939 diberlakukan sensor yang ketat terhadap semua bahan tertulis yang berasal dari Jepang.

Di balik tanda-tanda persiapan tersebut, ada gejala ketidakstabilan yang terjadi di kalangan Eropa. Perubahan dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari dengan adanya pergeseran dalam perhatian pemerintah. Sekolah-sekolah mereka diubah menjadi barak pertahanan. Beberapa proyek yang dilakukan pemerintah kota untuk menjaga warga kota Surabaya dari serangan udara, juga menyebabkan ketidakstabilan. Contohnya selama tahun 1940 pemerintah kota membangun ratusan pelindung bom yang digali di tanah-tanah rendah dan berpasir.²⁶

Surabaya sudah mulai berada di ambang keruntuhan. Keadaan saat itu menunjukkan bahwa persediaan perumahan semakin sulit, sehingga pengungsian segera dilakukan secara besar-besaran ke wilayah pedalaman. Kehidupan sehari-hari yang normal berhenti ketika sekolah-sekolah mereka mulai ditutup, para pelayan dan buruh kasar menghilang dari tempat kerja mereka, bahan-bahan pokok dan uang disembunyikan sehingga tidak ada persediaan makanan, serta hubungan telepon dengan ibu kota terputus. Pemerintah segera mengeluarkan undang-undang untuk melarang penduduk meninggalkan kota, namun peraturan tersebut semakin diabaikan. Banyak pengungsi yang memenuhi jalan-jalan ke arah selatan. Surabaya yang selalu sibuk dengan mobil yang berlalu lalang, sepeda, pejalan kaki, penjaja makanan di pinggir jalan, anak-anak kecil Eropa semuanya menghilang dan disembunyikan.²⁷

²⁴ *Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja gedurende het jaar 1927*, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Arsip tentang laporan kota praja Surabaya bagian perumahan umum, hlm. 124.

²⁵ G.H. von Faber, *op.cit.*, hlm. 34-35.

²⁶ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 104-106.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 110-111.

G. Pengaruh Adanya Pemukiman Eropa Terhadap Penduduk Bumiputera di Surabaya

Keberadaan pemukiman terpisah bagi etnis Eropa di Surabaya memberikan berbagai pengaruh yang dirasakan oleh penduduk Bumiputera di Surabaya. Mereka menjadi terasingkan ke daerah pinggiran kota dan menempati hunian yang disebut kampung. Kampung-kampung tersebut hanya berupa rumah sederhana yang tegak berhimpitan di sepanjang gang. Kesan yang didapat orang luar ketika melihat keadaan kampung adalah kerapatan dan kesesakannya, kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah pusat kota yang dibentuk dengan standar Eropa, jalanan beraspal, tembok berbeton, dan sebagainya. Jika musim hujan tiba, pemukiman kampung seketika terdapat bayak kubangan air lumpur karena jalan yang tidak beraspal serta tidak adanya sistem saluran air yang baik.²⁸

Menyikapi hal tersebut, sebuah rencana umum perbaikan kampung-kampung dimulai, untuk sementara waktu terbatas pada pembangunan pipa drainase baru dan perbaikan pipa drainase yang sudah ada, pembangunan selokan-selokan yang terhubung dengan pipa tersebut, pembangunan stasiun pompa air, serta fasilitas pemandian, cuci dan kakus. Pelaksanaan perbaikan kampung ini dilakukan secara bertahap. Berkat adanya perbaikan dari pemerintah kota ini adalah salah satu pengaruh positif bagi penduduk Bumiputera, kampung-kampung Bumiputera menjadi sebuah kampung yang layak huni bagi penduduknya serta memberikan citra yang baik dari keadaan sebelumnya.

H. Penutup

Kedatangan bangsa Eropa ke Surabaya tak terlepas dari peran Surabaya yang menjadi lokasi penting perdagangan komoditi ekspor sehingga menarik mereka untuk menjalin hubungan dagang dengan

warga lokal. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga memerlukan tempat tinggal. [Pemukiman Eropa di Surabaya mengalami perkembangan dikarenakan jumlah penduduk Eropa di Surabaya semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga diperlukan perluasan daerah pemukiman. Perluasan daerah pemukiman dilakukan ke arah selatan kota ketika Surabaya ditetapkan menjadi *gemeente* pada 1906. Perkembangan pemukiman Eropa di Surabaya meliputi perkembangan fasilitas-fasilitas umum pendukungnya.](#) Pemukiman Eropa di Surabaya pada awalnya berada di sekitar benteng yang berada di pesisir dan di kawasan Jembatan Merah. Perkembangan yang signifikan terjadi ketika Surabaya diberi hak otonomi untuk mengelola anggaran dananya secara mandiri yang ditandai dengan pemberian status *gemeente* pada tahun 1906.

Perluasan daerah pemukiman Eropa [setelah](#) menjadi *Gemeente* Surabaya, dilakukan ke arah selatan kota seperti Goebeng, Ketabang, Koepang, Ngagel, Darmo yang dilakukan secara bertahap. [Memasuki](#) tahun 1930, pembangunan perumahan semakin gencar dilakukan, fasilitas umum juga banyak yang mengalami renovasi. Hingga menjelang akhir pemerintahan kolonial, keadaan pemukiman Eropa di Surabaya berubah. Terdapat gejala ketidakstabilan yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Rumah-rumah mereka dijarah, sekolah-sekolah diubah menjadi barak pertahanan, pertokoan dirampok, dan Jepang terus melakukan pengeboman untuk meyakinkan orang Eropa bahwa masanya telah berakhir. Keberadaan pemukiman Eropa di Surabaya juga membawa pengaruh bagi penduduk Bumiputera. Pada awalnya mereka menjadi terasingkan ke daerah pinggiran kota dan menempati kampung dengan kondisi yang kumuh. Keadaan kampung yang kumuh itu dapat menyebabkan penduduknya mudah tertular

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

penyakit. Menyikapi hal tersebut, akhirnya pemerintah kota mengupayakan sebuah program perbaikan kampung-kampung penduduk Bumiputera. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan sistem drainase, saluran pembuangan, perbaikan kamar mandi, cuci, kakus, serta pemberian penerangan. Setelah adanya program perbaikan kampung, kini kampung-kampung penduduk Bumiputera menjadi lebih bersih, sehat, dan layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 329, tahun 1903.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 137, tahun 1905.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 181, tahun 1905.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 149, tahun 1906.
Verslag der Gemeente Soerabaja tahun 1913, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.
Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja tahun 1927, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.
Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja tahun 1928, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.
Verslag van den toestand der Stadsgemeente Soerabaja tahun 1930, Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.

Buku

- Astuti, S., Nurhajarini, D., & Nurdiyanto. 2016. *Pembangunan Pelabuhan Surabaya dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Sekitarnya Pada Abad XX*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
Broeshart, A. C. 1994. *Soerabaja: Beeld van een Stad*. Purmerend: Asia Maior.
Faber, G.H. von. 1931. *Oud Soerabaia*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.

- _____. 1937. *Nieuw Soerabaia*. Soerabaia: N.V. Boekhandel En Drukkerij H. Van Ingen.
Frederick, William H. 1989. *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi di Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: PT Gramedia.
Santoso, Joko Triwinarto. 2010. *A Study of Architect Cosman Citroen (1881-1935) And His Works in Surabaya*. Leiden: Universiteit Leiden.
Trisulistiyono, dkk. 2003. *Simpul-simpul Sejarah Maritim dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia*. Jakarta: Kemenbudpar.
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2004. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Malang: Banyumedia Publishing.

Artikel

- Teti Hestiliani, "Desentralisasi Wet Van Nederland Indies 1903", *ISTORIA Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 15, No. 2. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Skripsi dan Tesis

- Lillyana Mulya, "Kebijakan Maritim di Indonesia Masa Kolonial dan Pasca Kolonial", *Tesis*, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2013.
Ronald Gilbert Gill, "De Indische Stad op Java en Madura Een Morfologische Studie van haar Ontwikkeling", *Tesis*, Technische Faculteit der Bouwkunde Universiteit Delft, 1994.